#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang Penelitian

Laju pertumbuhan penduduk di berbagai negara dunia termasuk di negara Indonesia meningkat semakin tinggi. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 2021 jumlah penduduk di negara Indonesia ada 276,36 juta jiwa. Angka ini menjadikan negara Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah negara Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang besar dapat memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi suatu masyarakat sebagaimana mestinya yaitu seperti tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, terjadinya kekurangan sumber pangan, dan tingginya angka kemiskinan.

Masalah kemiskinan merupakan suatu permasalahan besar yang dihadapi oleh setiap negara. Dengan negara yang kaya akan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar ternyata masih banyak penduduk Indonesia yang tergolong miskin. Menurut Ritonga, et al. (2003), kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupan. Kebutuhan minimal tersebut mengacu kepada sesuatu yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan yang layak.

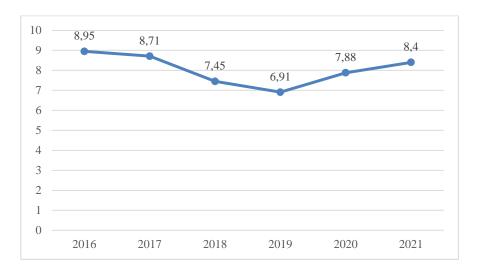
Ada banyak masalah penting yang perlu diselesaikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk permasalahan tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu bentuk dari permasalahan ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dan membuat masyarakat pada suatu wilayah tersebut memiliki kesenjangan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Permasalahan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yang pertama, tingkat pendapatan rumah tangga sangat rendah atau tidak ada pendapatan sama sekali. Kedua, tidak memiliki pendidikan dan keterampilan sangat rendah atau tidak sekolah, baik di pendidikan formal maupun informal. Ketiga, rendahnya tingkat kesehatan dan tidak cukup memiliki akses ke fasilitas kesehatan juga jadi faktor terjadinya kemiskinan.

Sejak ditemukan kasus pertama Covid-19 pada maret 2020 selain berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 juga berdampak signifikan pada peningkatan persentase jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS per Maret 2021, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke-16 terendah nasional. Angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat per Maret 2021

menurut data BPS mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,4 persen, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan per Maret 2020 yang mencapai 7,88 persen.



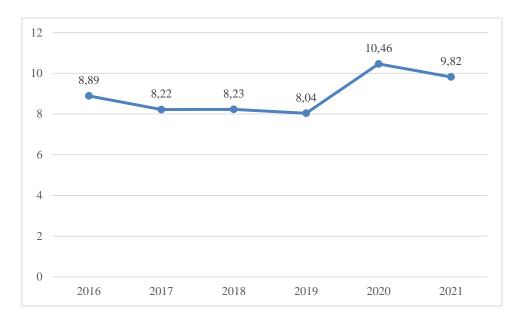
Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2021

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat selama enam tahun penelitian bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2016 sebesar 8,95 persen sedangkan persentase penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,91 persen.

Jumlah penduduk miskin merupakan tolak ukur keberhasilan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Barat yang berarti dalam menanggulangi kemiskinannya belum sepenuhnya berhasil. Masalah kemiskinan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti

tingkat pengangguran, IPM, dan laju pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor tersebut akan dibahas satu persatu dalam penelitian ini.



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2021

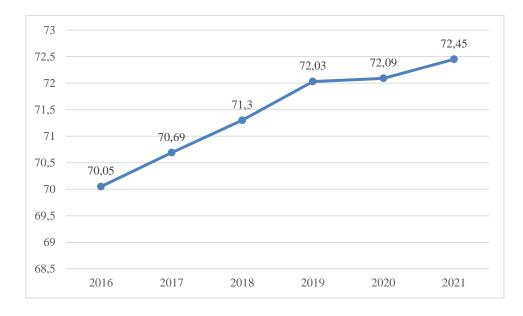
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat selama enam tahun penelitian bahwa tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2020 sebesar 10,46 persen sedangkan tingkat pengangguran terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 8,04 persen.

Salah satu faktor tingkat kemiskinan yaitu tingkat pengangguran. Menurut Muslis (2014), pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Salah satu faktornya

adalah populasi penduduk Indonesia yang besar sehingga memunculkan angkatan kerja baru tiap tahunnya dan berdampak pada tingkat pengangguran.

Tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran yang dimana jika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan akan meningkat secara otomatis. Jumlah pengangguran yang meningkat dapat menimbulkan dampak pada proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus mengatasi pengangguran karena apabila keadaan pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan sosial dan politik akan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang.



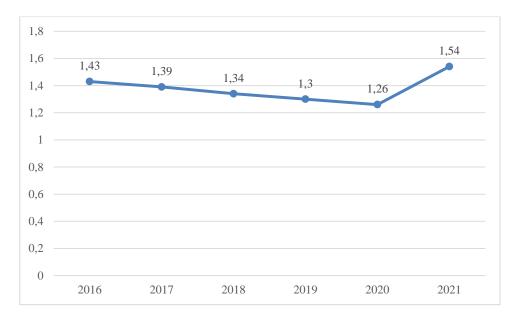
Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2021

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat selama enam

tahun penelitian bahwa indeks pembangunan manusia tertinggi pada tahun 2021 sebesar 72,45 persen sedangkan indeks pembangunan manusia terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 70,05 persen.

Penyebab lain meningkatnya tingkat kemiskinan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia memiliki andil dalam usaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kualitas hidup manusia yang baik akan menjadi faktor pendukung rendahnya jumlah penduduk miskin. Semakin tinggi tingkat indeks pembangunan manusia maka akan memperlihatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang yang semakin baik.



Gambar 1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2021

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat dilihat selama enam tahun penelitian bahwa laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2021

sebesar 1,54 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,26 persen.

Indikator lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Menurut Dumairy (1996), kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan membuat prospek pembangunan menjadi lambat.

Kontrol akan meningkatnya pertumbuhan penduduk perlu dilakukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak terkendali dapat menyebabkan tujuan pembangunan ekonomi tidak tercapai sehingga kesejahteraan rakyat semakin rendah.

Dari beberapa permasalahan dalam latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, IPM, dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2021"

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi malasah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, IPM, dan laju pertumbuhan penduduk secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2005 - 2021?  Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran, IPM, dan laju pertumbuhan penduduk secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2005 - 2021?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, IPM, dan laju pertumbuhan penduduk secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2005 - 2021.
- Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran, IPM, dan laju pertumbuhan penduduk secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2005 - 2021.

#### 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Adapaun kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

# 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang berbagai faktor pengaruh tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya itu, penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

## 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya yang menyangkut penelitian yang sama pada lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi.

## 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam memahami faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor yang dipacu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

## 4. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan agar dapat memahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat dengan mengakses website resmi BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Barat.

#### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Juli 2023. Kegiatan penelitian ini diawali dengan melakukan pengajuan *outline* kepada pihak pengelola Program Studi Ekonomi Pembangunan dan diakhiri dengan pengesahan

skripsi.	Tahapan	kegiatan	penelitian	secara	rinci	ditampilkan	pada	tabel	1.1
berikut									ini.

**Tabel 1.1 Jadwal Penelitian** 

		Tahun 2022																Tahun 2023																																			
No.	Kegiatan	A	gt		Sep			Okt				Nov					Des				Jan				Feb					Mar					Ap	r		Mei					Jun						Jul	Jul			
		3	4	1	2	3	4	4	1	2	3	4	1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	.	1	2	3	4	1	2	3		4	1	2	3	4	1	2	3	3	4
1	Pengajuan outline dan rekomendasi pembimbing																																																				
2	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan																																																				
3	Proses bimbingan untuk menyelesaikan proposal																																																				
4	Seminar Proposal Skripsi																																																				
5	Revisi Proposal Skripsi dan persetujuan revisi																																																				
6	Pengumpulan dan pengolahan data																																																				
7	Proses bimbingan untuk menyelesaikan skripsi																																																				
8	Ujian skripsi, revisi Skripsi, dan pengesahan Skripsi																																																				